

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI
PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN
LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK**

TESIS

Oleh

**Wilvridus Watu
NIM: 2002190068**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI
PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN
LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Wilvridus Watu
NIM: 2002190068**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuannya yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karyatugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Mei 2023



**Wilvridus Watu
NIM: 2002190068**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI PASIEN
YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN LAYANAN
KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK

Oleh:

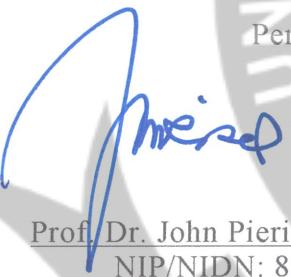
Nama : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum
Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.
NIP/NIDN: 8807033420

Pembimbing II


Dr. Fernando Silalahi, S.T.,S.H.,M.H.,C.L.A
NIP/NIDN: 0322117104

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H.
NIP/NIDN: 0327096504

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd
NIP/NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 31 Mei 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S. Sebagai Ketua..... 

2. Dr. Fernando Silalahi, S.T.,S.H.,M.H.,C.L.A. Sebagai Anggota..... 

3. Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H., M.Hum. Sebagai Anggota..... 



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2023



Wilvridus Watu
NIM: 2002190068



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kcpada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pasien Yang Dipidana Akibat Menyebarluaskan Layanan Kesehatan Yang Tidak Layak.”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan bati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis: Bapak Paulus Foa, Almarhumah Mama Maria Angwiberta Lobo, Bapak Aloisius Woso, Mama Yustina Bupu, Jon Dopo, Bapak Kance dan Mama Ova. Terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Istri Penulis “Mama Maria Ermelinda Menge”, terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 31 Mei 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan	10
1.4. Manfaat Penulisan.....	11
1.5. Kegunaan Penulisan.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1.Tinjauan Teoritis	15
2.1.1. Teori Equality Before The Law.....	15
2.1.2. Teori Negara Hukum	17
2.1.3. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State).....	22
2.1.4. Politik Hukum.....	24
2.2. Kebaruan Penelitian	26
2.3. Pengertian.....	28
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum Pasien	28
2.3.2. Perlindungan Hukum Pasien.....	30
2.4. Hukum Kesehatan.....	46
2.4.1. Pelayanan Kesehatan.....	48
2.4.2. Hak Di Bidang Kesehatan	48
2.4.3. Kewajiban Di Bidang Kesehatan.....	49
2.4.4. Tnggung Jawab Pemerintah Dalam Kesehatan	50
2.4.5. Perlindungan Pasien.....	50
2.4.6. Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan.....	52
2.4.7. Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi	55
2.5. Rumah Sakit	55
2.6. Praktik Kedokteran.....	63
2.7. Pengertian Konsumen	70
2.8. Tanggung Jawab Hukum	75
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SANGAT PENTING DILAKUKAN DI INDONESIA.....	79
3.1. Kesehatan Sebagai Aset Untuk Kemajuan Bangsa	79
3.2. Hak dan Hukum atas Pelayanan Kesehatan.....	85
3.3. Pelayanan Kesehatan Sebagai Tanggungjawab Pemerintah	85

3.4. Hukum Baru Sebagai Payung Untuk Melindungi Pasien.....	93
BAB IV TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PASIEN YANG DIPIDANA AKIBAT MENYEBARLUASKAN LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK LAYAK.....	90
4.1. Bentuk Tanggung Jawab Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan UUD. NRI Tahun 1945	90
4.2. Faktor-Faktor Tenaga Kesehatan Melakukan Kesalahan Dan Atau Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien.....	103
4.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Malpraktek Dikaji dari KUHP.....	104
4.4. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Akibat Kesalan-kesahan Maupun Kelalaian.....	105
4.5. Keluhan Pasien Atas Layanan Kesehatan Yang Kurang Baik	106
4.6. Pembaharuan Hukum Untuk Melindungi Hak Pasien.....	114
BAB V PENUTUP.....	117
5.1. Kesimpulan.....	117
5.2. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

ABSTRAK

Nama : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Judul : Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pasien Yang Dipidana Akibat Menyebarluaskan Layanan Kesehatan Yang Tidak Layak

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara berupaya memberikan perhatian dan pelayanan kesehatan mulai dari penyediaan tenaga kesehatan profesional sampai fasilitas layanan kesehatan yang modern. Negara telah memberlakukan peraturan-peraturan hukum pada bidang kesehatan sebagai pedoman yuridis untuk melindungi penerima dan pemberi jasa dibidang kesehatan. Berbagai cara telah dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik, salah satu keberhasilannya adalah tidak adanya keluhan dari penerima jasa atau pasien. Kalaupun ada keluhan, seyoginya diterima dan mampu menyelesaikannya dengan baik. Dalam berbagai kasus biasanya pasien berada pada posisi yang lemah dan kehilangan haknya, seperti kasus Prita Mulyasari, ia harus rela kehilangan kebebasannya karena dipidana dengan tuduhan telah menyebarluaskan layanan kesehatan yang tidak layak, kemudian setelah melewati proses hukum yang berlarut-larut, Mahkamah Agung RI menyatakan Prita tidak bersalah mencemarkan nama baik, belajar dari kasus tersebut, negara wajib bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kualitatif guna menggambarkan dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan masyarakat kususnya pasien menantikan kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan yang meningkatkan kualitas kesehatan guna mengurangi keluhan atas layanan yang diterima. Sebagai solusi untuk memaksimalkan layanan kesehatan yang berkualitas seyoginya negara meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan layanan kesehatan serta secara eksplisit membentuk undang-undang khusus pasien agar pasien dilindungi secara paripurna dan ketidakpuasan layanan kesehatan dapat disampaikan tanpa rasa takut di pidana pencemaran nama baik.

Kata Kunci: **Pidana, Pasien dan pelayanan.**

ABSTRACT

Name : Wilvridus Watu
NIM : 2002190068
Title : *State Responsibility In Protecting Patients Criminated For Spreading Inadequate Health Services*

Health is an important element in the progress of a country. Every country strives to provide health care and services, starting from the provision of professional health workers to modern health care facilities. The state has enacted legal regulations in the health sector as a juridical guideline to protect recipients and service providers in the health sector. Various ways have been done to provide the best health services, one of the successes is the absence of complaints from service recipients or patients. Even if there are complaints, they should be accepted and able to resolve them properly. In various cases, patients are usually in a weak position and lose their rights, such as in the case of Prita Mulyasari, he must be willing to lose his freedom because he was convicted on charges of distributing inappropriate health services, then after going through a protracted legal process, the Supreme Court of the Republic of Indonesia stated Prita is not guilty of defamation, learning from this case, the state must be responsible for providing proper health services as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods with statutory approaches, legal concept approaches, and qualitative approach to describe and produce descriptive data. The results of this study, the authors found that people, especially patients, look forward to health service policies and practices that improve the quality of health in order to reduce complaints about the services received. As a solution to maximizing quality health services, the state should increase the state revenue and expenditure budget to meet the needs of the provision of health services and explicitly establish patient-specific laws so that patients are fully protected and health service dissatisfaction can be conveyed without fear of being criminally defamed good.

Keywords: *Criminal, Patients and services.*